

# IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DI SUB-SUB RECIPIENT (SSR) TB-HIV CARE 'AISYIYAH KABUPATEN SIDOARJO

Triani Wulidati Anisa<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN "Veteran" Jawa Timur  
Email: wulidatianisa@gmail.com

## ABSTRACT

*Corruption cases that happened in Indonesia has been very worrying, and this in accordance with Indonesia Corruption Watch (ICW) stating there were 226 cases of corruption in time early 2017 (January-June 2017) and according to put Indonesia in the 7th position of ASEAN.*

*The research method used is qualitative method with the intepretif approach. The data obtained through interview, observation, documentation and library studies. The theory used in this research is the theory of good governance and stewardship theory.*

*The results of this research show that the application of good gouvernance Sub-Sub Recipient (SSR) TB-HIV Care ' Aisyiyah Sidoarjo has been maximized, because in practice is in compliance with the principles of good governance, such as accountability already a maximum of performance results, was already successfully proven transparency of presentation of financial statements that are honest, high community participation, SSR response so fat toward complaints of the community and the global fund, as well as the rule of law which is already adhered to. Of the implementation of good governance which is already at the maximum, exposing the existence of SSR TB-HIV Care ' Aisyiyah Sidoarjo as an NGO can be trusted to act in accordance with the interests of the Global Fund..*

**Keyword:** Implementation, Good Governance

## PENDAHULUAN

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Hal ini diperkuat dengan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyatakan bahwa dalam kurung 6 bulan saja (Januari-Juni 2017) ada 226 kasus korupsi yang

sudah terjadi. Kasus dengan jumlah tersangka 587 orang itu merugikan negara Rp 1,83 triliun dan nilai suap Rp 118,1 miliar.

Berita yang dilansir dalam laman citizen6.liputan6.com pada 12 Februari 2017, Transparency International Indonesia (TII) merilis peringkat indeks persepsi angka korupsi Indonesia tahun 2016 di tingkat internasional. Dalam rilis yang disampaikan, skor corruption perception index (CPI) Indonesia naik 1 poin dari tahun sebelumnya menjadi 37. Hasil CPI tahun 2016, TII menempatkan Indonesia di posisi ke-7 se ASEAN.

Salah satu penyebab terjadinya korupsi yaitu kurang maksimalnya penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) di perusahaan atau organisasi. Perwujudan tata kelola yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap perusahaan atau organisasi untuk memenuhi aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita organisasi. *Good governance* selama ini diketahui hanya diterapkan dalam pemerintahan dan korporasi (*Good Corporate Governance*), namun seiring berkembangnya zaman tidak hanya praktisi pemerintahan dan korporasi saja yang dituntut menerapkan prinsip *good governance*, namun organisasi non profit pun dituntut bekerja secara profesional dengan menerapkan prinsip *good governance*.

SSR (*Sub-Sub Recipient*) TB-HIV Care Aisyiyah Kabupaten Sidoarjo merupakan organisasi non-profit yang bergerak dalam bidang kebijakan publik, yaitu kesehatan masyarakat khususnya terkait dengan penyakit TB-HIV. Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Sidoarjo dibawah Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Timur dan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, yang akan menjadi penanggung jawab atas semua kegiatan dan program SSR (*Sub-Sub Recipient*) TB-HIV Care Aisyiyah Kabupaten Sidoarjo agar dapat menciptakan masyarakat yang bebas dari penyakit TB-HIV di wilayah kabupaten Sidoarjo. SSR TB-HIV Care 'Aisyiyah Kabupaten Sidoarjo baru berdiri pada Maret 2016.

Tuntutan akan penerapan prinsip-prinsip *good governance* membuat lembaga donor lokal maupun internasional menerapkan aturan yang ketat dalam pertanggungjawaban di negara bantuan. Kasus korupsi yang sangat merebak di

Indonesia, membuat *Global Fund* terkenal ketat dalam hal pertanggungjawaban dana yang telah dikucurkan, baik dilihat dari sisi anggaran, pertanggungjawaban, maupun proses auditnya yang melalui beraneka macam audit (bunga rampai audit). Audit yang dimaksud diantaranya, yaitu audit keuangan (*financial audit*), audit kepatuhan (*compliance audit*) dan audit kinerja (*performance audit*). Hal ini karena *Global Fund* harus mempertanggungjawabkan semua dana yang telah disalurkan ke negara-negara penerima kepada kumpulan negara penyumbang *Global fund* yang tersebar dari beberapa benua, seperti negara-negara di benua Afrika, Amerika, dan negara maju di Benua Asia.

*Global Fund* juga menerapkan aturan administrasi yang sangat ketat kepada SSR TB-HIV Care 'Aisyiyah Kabupaten Sidoarjo, yang dimana aturan tersebut tertuang dalam PIP (Panduan Implementasi Program) dan Petunjuk Teknis Keuangan (Juknis). Sebagai gambaran bahwa administrasi yang diterapkan oleh *Global Fund* sangat ketat, untuk membeli pulsa yang digunakan untuk komunikasi tim, tidak hanya melampirkan adanya kuitansi namun juga dokumen pendukungnya seperti form permintaan pembelian jasa/barang, dan form pengisian pulsa.

Dalam keberlangsungan program akan berlangsung lama apabila negara penerima bantuan (dalam penelitian ini SSR TB-HIV Care 'Aisyiyah Kabupaten Sidoarjo) mampu menerapkan prinsip-prinsip good governance untuk diterapkan di dalam organisasi. Hal ini dikarenakan menjadi salah satu penilaian bagi lembaga pendonor (*Global Fund*) untuk melihat apakah SSR TB-HIV Care 'Aisyiyah Kabupaten Sidoarjo masih layak untuk mendapatkan hibah program TB-HIV atau tidak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengembangkan pembahasan serta melakukan penelitian lebih dalam dengan judul "Implementasi Good Governance di SSR TB-HIV CARE 'AISYIYAH KABUPATEN SIDOARJO".

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tata kelola organisasi di SSR (*Sub-Sub Recipient*) TB-HIV CARE 'AISYIYAH KABUPATEN SIDOARJO dalam menerapkan prinsip *good governance*?

Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk untuk mengidentifikasi tata kelola organisasi di SSR (Sub-Sub Recipient) TB-HIV CARE 'AISYIAH KABUPATEN SIDOARJO dalam menerapkan prinsip *good governance*.

## **TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS.**

### ***Stewardship Theory***

Stewardship Theory, yang merupakan bagian dari teori keagenan (Donaldson dan Davis, 1991). Stewardship Theory menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson dan Davis, 1991). Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Konsep teori ini didasarkan pada asas kepercayaan pada pihak yang diberikan wewenang, dimana manajemen dalam suatu organisasi dicerminkan sebagai good steward yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya dengan penuh tanggung jawab.

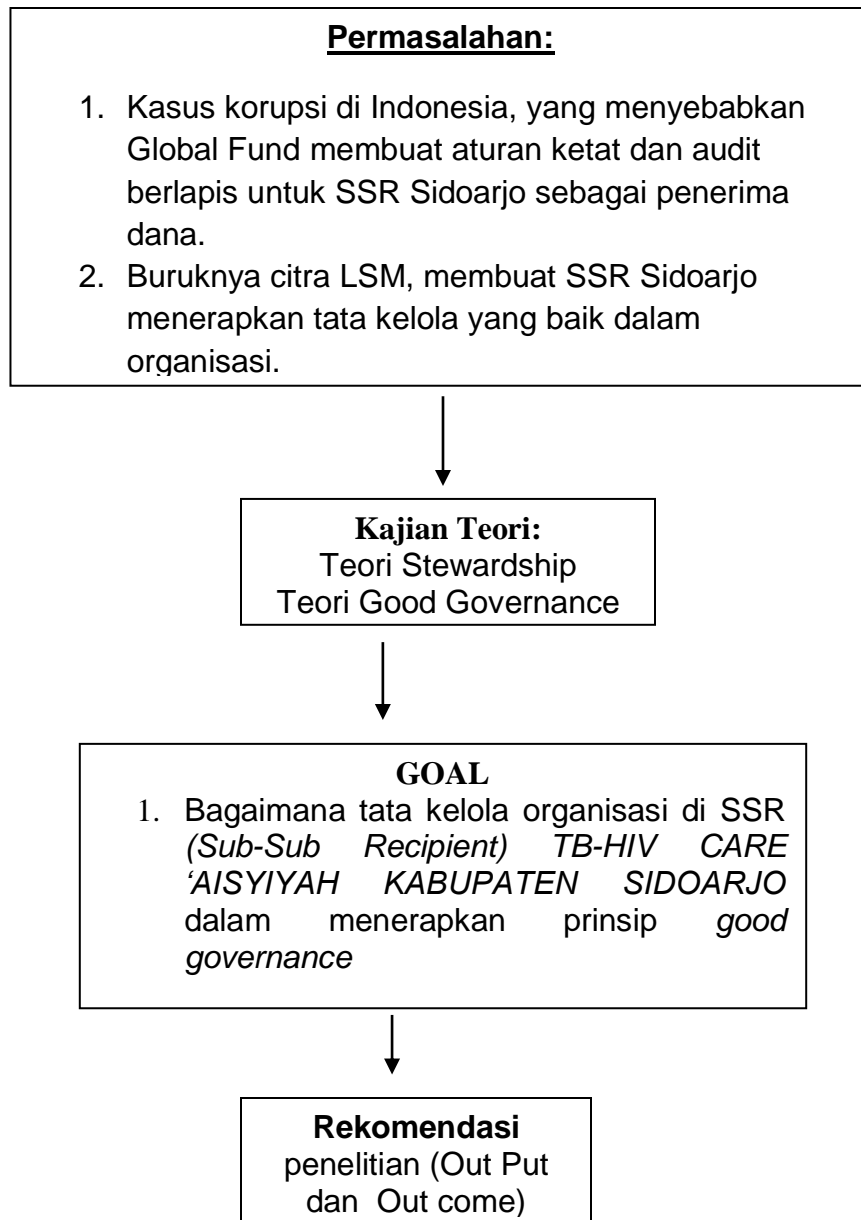
### ***Good Governance***

World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mustofa, 2013). governance yang baik hanya dapat tercipta apabila dua kekuatan saling mendukung, warga yang bertanggung jawab, aktif dan memiliki kesadaran, bersama dengan pemerintah/ pihak organisasi yang transparan, tanggap, mau mendengar, dan mau melibatkan (inklusif). Dengan adanya good governance tata kelola organisasi akan semakin solid sehingga akan mencegah penghindaran salah alokasi dana dan meminimalisir terjadinya korupsi. Ada empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas : adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak sebagai penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.
2. Transparansi : pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah.
3. Keterbukaan : menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.
4. Aturan hukum : pemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

Dengan penerapan prinsip-prinsip good governance, diharapkan upaya pemerintah dan masyarakat dalam menata kehidupan sosial, ekonomi dan politik akan segera terwujud seiring dengan perkembangan peradaban masyarakat madani.

## Model Analisis



## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif interpretatif. Menurut Moleong (2011) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Data penelitian kualitatif berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Penelitian interpretatif memfokuskan pada sifat subjektif dari dunia sosial dan berusaha memahami kerangka berfikir objek yang sedang dipelajari (Ghozali, 2007).

### **Fokus Penelitian**

Mengingat luasnya permasalahan yang melingkupi SSR TB-HIV Care 'Aisyiyah Kabupaten Sidoarjo, maka secara konseptual dalam penelitian ini dibatasi pada permasalahan: Bagaimana penerapan prinsip-prinsip good governance (khususnya prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, responsif, taat aturan) dalam tata kelola organisasi di SSR TB-HIV Care 'Aisyiyah Kabupaten Sidoarjo. Penetapan fokus kajian pada ke-lima nilai tersebut dengan argumentasi sebagai berikut:

a. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas dalam penelitian ini dilihat dari bagaimana para pemegang program berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan dana serta kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan padanya kepada global fund.

b. Transparansi

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu. Transparansi juga merupakan jaminan kepada pihak berkepentingan untuk memperoleh informasi terkait dengan pelaksanaan

program kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi. Organisasi yang menerapkan prinsip transparansi maka akan meningkatkan tingkat kepercayaan stakeholder terhadap organisasi tersebut.

Dalam penelitian ini, fokus penelitian untuk prinsip transparansi adalah bagaimana SSR memberikan informasi keuangan yang akuntabel kepada pihak global fund melalui laporan pertanggungjawaban yang sudah ditentukan dalam aturan PIP dan Juknis Keuangan.

c. Partisipasi

Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan organisasi. Partisipasi disini bisa dalam bentuk kritik dan saran untuk SSR terkait dengan pelaksanaan program sehingga pihak SSR dan masyarakat terjalin komunikasi yang harmonis.

Dalam penelitian ini, fokus penelitian untuk prinsip partisipasi dilihat dari bagaimana interaksi SSR TB-HIV Care Aisyiyah dengan masyarakat luar khususnya di Kabupaten Sidoarjo dan bagaimana tanggapan dari masyarakat atas hadirnya SSR di Sidoarjo.

d. Responsif

Perwujudan asas responsif organisasi harus melakukan upaya-upaya strategis dalam memberikan perlakuan yang humanis pada kelompok-kelompok masyarakat tanpa pandang bulu. Sebuah organisasi dikatakan memiliki tata kelola yang baik apabila organisasi tersebut bisa merespon fenomena yang ada dengan cepat. Responsif memiliki efek positif terhadap perbaikan organisasi, peningkatan outcomes, dan berpengaruh mekanisme kontrol.

Adapun terkait pelaporan keuangan, SSR Sidoarjo juga dituntut untuk memberikan respon dengan cepat atas permintaan-permintaan pihak Global Fund. Respon yang cepat dalam menanggapi perintah dari Global Fund itu juga harus sudah diperlihatkan oleh SSR. Kelengkapan laporan keuangan beserta dokumen pendukungnya juga harus diperhatikan oleh tim



SSR. Sebagaimana yang telah diatur dalam PIP, SSR harus dapat melakukan penyimpanan/pemeliharaan buku akuntansi, pencatatan, dokumen dan semua bukti-bukti terkait pada Grant Agreement, untuk menunjukkan semua biaya yang dikeluarkan dan pendapatan yang diperoleh SSR untuk Program dan semua kemajuan lainnya terkait penyelesaian pelaksanaan program.

e. Taat Aturan (Rule of the law)

Dalam penelitian ini, untuk prinsip rule of the law lebih menekankan bagaimana SSR mengikuti aturan dari global fund dalam pelaksanaan kegiatannya. Aturan global fund yang dimaksud adalah aturan yang ada di PIP dan Petunjuk Teknis Keuangan yang dimana sudah disesuaikan dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

## PEMBAHASAN DAN SIMPULAN

Hasil penelitian yang diperoleh di lapangan sebagaimana tersaji pada uraian penyajian data dan analisis data diatas, akan mencari relevansinya dengan teori - teori yang sudah ada. Hal ini dilakukan sebagai langkah lanjutan untuk mengkonfirmasi atau membandingkan temuan dengan teori sehingga didapatkan jawaban dari rumusan masalah secara keseluruhan. Dalam penelitian ini peneliti mengkonfirmasi hasil temuan dengan Teori *Stewardship* dan teori *good governance*.

Hasil penelitian yang ditemui dilapangan, dapat ditemui bagaimana SSR menerapkan tata kelola organisasinya dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* di SSR TB-HIV Care Aisyiyah Kabupaten Sidoarjo. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Responsif, dan Taat Aturan (*Rule of The Law*).

Pertama, Akuntabilitas, SSR menjelaskan bagaimana dia menggunakan sumberdayanya dan apa yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan penerima manfaat. Semua pemangku kepentingan berhak untuk mengetahui bagaimana dana dan kewenangan digunakan.

SSR TB-HIV Care 'Aisyiyah sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola organisasinya. Hal ini bisa dilihat dalam pembuatan pertanggungjawaban yang akuntabel dari semua hasil kegiatan pelaksanaan program berupa laporan bulanan keuangan (tiap bulan) dan laporan pelaksanaan

program (per akhir kuartal), yang sudah sesuai dengan peraturan dari *Global Fund* yang tertuang dalam Pedoman Implementasi Proyek dan Teknis Keuangan. Aturan akuntabilitas dalam PIP lebih menggambarkan bagaimana SSR menggunakan sumber dayanya dan apa yang telah dicapai sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan penerima manfaat.

Proses pertanggungjawaban yang sangat rumit dari pihak *Global Fund* juga mengharuskan SSR harus lebih ketat dalam pengendalian kontrolnya. PDA Kabupaten Sidoarjo biasanya melakukan kontrol terhadap proses pertanggungjawaban untuk melihat apakah pelaksanaan di SSR berjalan sesuai dengan aturan. Adanya *controlling* dari PDA dapat menghasilkan kualitas pelaporan keuangan yang maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak *Global Fund* sebagai lembaga donor dari SSR.

Kedua, Transparansi, organisasi harus terbuka berkenaan dengan pekerjaannya, menyediakan informasi berkaitan dengan rencana dan aktivitasnya kepada para pemangku kepentingan. Termasuk didalamnya, menyiapkan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu serta dapat dengan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Laporan keuangan sendiri merupakan fungsi pertanggungjawaban dana yang dapat diterima sekaligus sebagai alat di dalam melakukan pengendalian.

Bentuk Transparansi yang dilakukan oleh SSR TB-HIV kepada *Global Fund* yaitu dalam penyajian laporan keuangan tiap bulan. Adanya tuntutan transparansi yang diminta oleh pihak *Global Fund* semakin meningkat, tidak terkecuali transparansi dalam pertanggungjawaban pelaporan keuangan SSR. *Global Fund* memberikan kewajiban kepada SSR untuk menyusun laporan pertanggungjawaban yang jujur dalam sistem akuntansi yang sudah diatur dalam bentuk pedoman implementasi proyek (PIP) dan Petunjuk Teknis Keuangan (Juknis) yang bersifat mengikat untuk SSR. Dimana dalam laporan keuangan menyediakan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh *Global Fund*. Dari Informasi dalam laporan keuangan tersebut pihak *Global Fund* akan mengetahui anggaran yang digunakan dan berapa lama jangka waktu pelaksanaan kegiatan serta kelengkapan dokumen pendukung keuangan apakah sudah sesuai dengan PIP dan Juknis.

SSR Sidoarjo sudah maksimal menerapkan prinsip transparansi dalam tata kelola organisasinya. Hal ini dapat dilihat dari penyajian informasi dalam komponen laporan bulanan *bentuk softcopy* dan *hardcopy* yang harus dikumpulkan pada awal bulan berikutnya. Seluruh transaksi harian di SSR harus diinput secara sistematis dalam *software* yang sudah disediakan oleh *Global Fund*. Informasi dalam laporan bulanan juga harus dapat dipahami bagi para pemegang kepentingan. Dalam menghasilkan informasi keuangan yang transparansi perlu

adanya peran internal kontrol, yang dimana di SSR dipegang oleh kepala SSR dan Koordinator Program SSR.

Ketiga, Partisipasi, bentuk partisipasi dari SSR TB-HIV Care Aisyiyah adalah melibatkan masyarakat untuk memberikan kritik dan saran untuk SSR terkait dengan pelaksanaan program sehingga pihak SSR dan masyarakat terjalin komunikasi yang harmonis. Selain itu, Masyarakat juga selalu dilibatkan dalam program yang diadakan oleh SSR. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menyambut hadirnya SSR dalam memberantas penyakit. Selain itu, ini bisa menjadi gambaran pihak *Global Fund* bahwa dengan SSR benar-benar konsisten dalam menggunakan dana hibah yang diberikan untuk mengajak masyarakat menanggulangi TB.

Keempat, Responsif, bentuk responsif dari SSR TB-HIV Care Aisyiyah Kabupaten Sidoarjo disini selain cepat menanggapi keluhan dari masyarakat, juga dituntut untuk cepat menanggapi permintaan-permintaan dari pihak *Global Fund*. Keluhan dan kritikan dari masyarakat biasanya akan dirapatkan kembali dengan pihak PDA dan biasanya akan direalisasi dalam waktu yang tidak lama. Sedangkan permintaan dari *Global Fund* biasanya terkait dengan kelengkapan dokumen keuangan. Disini, staf keuangan (khususnya) beserta TIM SSR mempunyai kewajiban untuk memenuhi segala permintaan GF apabila dokumen keuangan yang telah dibuat dan disajikan tidak sesuai dengan aturan PIP dan Juknis. Misalnya pada masa audit, biasanya selain menyiapkan bukti dokumen yang diminta, staf keuangan juga harus cepat menanggapi pertanyaan-pertanyaan terkait transaksi yang menjadi temuan.

Kelima, *Rule of the Law* (Ta'at Aturan). Hukum itu ada untuk menjaga supaya organisasi dapat bertanggung jawab dengan kebebasan yang dimilikinya. Ada batasan-batasan dari tiap individu untuk berekspresi, dan batasan itu adalah hukum. Hukum itu ibarat koridor yang dibuat untuk organisasi berjalan menuju sebuah tempat. Keputusan yang dibuat seharusnya tidak melanggar koridor-koridor tersebut dan tidak membuat organisasi untuk keluar dari koridor tersebut.

Landasan aturan yang digunakan di SSR Sidoarjo meliputi aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak *Global Fund* dalam bentuk Pedoman Implementasi Program dan Petunjuk Teknis Keuangan yang dimana aturan yang dibuat disesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia yaitu PSAK 45. Dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan yang dilakukan SSR harus mengikuti aturan yang ada.

Implikasi teori *good governance* terhadap penelitian ini dapat menjelaskan tata kelola organisasi yang baik dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance* di SSR. Implementasi tata kelola organisasi dalam mewujudkan *good*

*governance* sangat erat kaitannya dengan 5 (lima) prinsip *good governance* yaitu : akuntabilitas, transparansi, partisipasi, responsif serta *rule of the law*. Penerapan *good governance* dalam tata kelola organisasi itu berguna untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang informatif, tepat waktu serta akuntabel dengan menaati aturan yang sudah ditetapkan oleh *pihak* lembaga donor (*Global Fund*) sebagai acuan dalam menyusun laporan tersebut. Penerapan *good governance* sendiri menjadi suatu acuan bagi lembaga donor untuk melihat bagaimana negara bantuan (SSR) memperkuat organisasinya dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang di biayai oleh lembaga donor. *Global Fund* melihat kesuksesan-kesuksesan proyek yang mereka biayai di SSR sebagai suatu gambaran kuatnya organisasi pelaksana di negara – negara bantuan. Hal ini disebabkan oleh praktik penerapan *good governance* yang terwujud dari laporan pertanggungjawaban yang akuntabel dan transparan, tingginya partisipasi warga, cepatnya daya tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan pihak *global fund* serta menaati peraturan yang ada.

Teori Stewardship dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik dan *non profit lainnya*. Akuntansi sebagai penggerak (*driver*) berjalannya transaksi bergerak ke arah yang semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan organisasi non profit.

Tuntutan akan penerapan prinsip-prinsip *good governance* membuat lembaga donor lokal maupun internasional menerapkan aturan yang ketat dalam pertanggungjawaban di negara bantuan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan menjadi semakin nyata. *Global Fund* sebagai *principal* mempercayakan pengelolaan dana hibah nya kepada pihak SSR TB Care Kabupaten Sidoarjo (*steward*) yang dimana dianggap lebih *capable* dan siap.

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini dapat menjelaskan eksistensi SSR TB Care Kabupaten Sidoarjo sebagai suatu LSM yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan *Global Fund* dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan dalam pemberantasan TB dapat tercapai secara maksimal. Adapun hubungan teori *stewardship* dengan implementasi *good governance* adalah bagaimana cara PDA sebagai *steward* dapat memuaskan permintaan *Global Fund* sebagai *principal*-nya dalam mempertanggungjawabkan dana yang telah diberikan untuk pemberantasan TB di Sidoarjo. Dalam penelitian ini, pelaksanaan semua kegiatan yang dilakukan SSR dikontrol oleh seorang kepala SSR dan koordinator SSR sebagai perwakilan dari PDA Sidoarjo. Kepala SSR beserta koordinator program SSR mempunyai peranan penting sebagai internal kontrol dalam mengarahkan semua keahliannya dalam ikut membantu staf keuangan untuk mendapatkan laporan informasi keuangan

yang berkualitas. Dari informasi keuangan yang berkualitas itu akan membuat pihak *Global Fund* melihat sejauh mana penggunaan dana yang dihibahkan ke PDA Sidoarjo. Karena ini juga menjadi pedoman bagi pihak GF apakah PDA Sidoarjo masih layak dikasih amanah untuk memegang program TB atau tidak.

## **Simpulan**

Berdasarkan data – data yang peneliti sajikan dan analisa, maka peneliti akan menyimpulkan bahwa: SSR TB-HIV Care Aisyiyah Kabupaten Sidoarjo sudah berhasil menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola organisasinya, yang dapat disimpulkan dalam beberapa hal berikut :

Prinsip Akuntabilitas sudah berhasil diterapkan dalam tata kelola organisasi di SSR khususnya dalam pertanggungjawaban dana hibah *Global Fund*. Pelaporan keuangan yang ada di SSR TB-HIV Care 'Aisyiyah Kabupaten Sidoarjo sudah dapat dikatakan akuntabel, karena proses pertanggungjawabannya harus disesuaikan dengan peraturan PIP dan Juknis Keuangan yang sudah ada.

Prinsip Transparansi sudah berhasil diterapkan dalam tata kelola organisasi SSR, yang dapat dinilai dari penyajian laporan keuangan yang disajikan SSR dengan penyajian yang jujur dan terbuka oleh pihak yang berkepentingan, yaitu *Global Fund*.

Prinsip partisipasi sudah berhasil diterapkan di SSR. Hal ini sesuai dengan di lapangan bahwa SSR telah proaktif dalam menjalin hubungan dan memfasilitasi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dan terlibat dalam segenap aktifitas SSR. Hal ini bisa menjadikan pandangan kepada pihak *Global Fund* bahwa dana yang dihibahkan untuk pemberantasan TB di SSR sidoarjo benar-benar dimanfaatkan dengan baik untuk masyarakat.

Prinsip Responsif sudah berhasil diterapkan di SSR, dilihat dari bagaimana cepatnya SSR dalam menanggapi keluhan dari masyarakat, dan cepat menanggapi permintaan-permintaan dari pihak *Global Fund*. Keluhan dan kritikan dari masyarakat biasanya akan dirapatkan kembali dengan pihak PDA dan

biasanya akan direalisasi dalam waktu yang tidak lama. Sedangkan permintaan dari *Global Fund* biasanya terkait dengan kelengkapan dokumen keuangan.

Prinsip taat aturan (*rule of the law*) yang diterapkan di SSR dengan mengikuti aturan dari *global fund* dalam bentuk PIP dan Juknis yang sudah disesuaikan dengan standar akuntansi di Indonesia, yaitu PSAK 45. Dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan yang dilakukan SSR sudah mengikuti aturan yang ada, hal ini dilihat dari catatan audit yang ada di SSR yang menunjukkan bahwa di SSR belum ditemukan temuan adanya *fraud*.

Dilihat dari persepsi teori *stewardship*, eksistensi SSR TB Care Kabupaten Sidoarjo sebagai suatu LSM yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan *Global Fund* dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya sesuai dengan aturan GF, sehingga tujuan dalam pemberantasan TB dapat tercapai secara maksimal.

## **Saran**

Dalam fokus penelitiannya implementasi *good governance*, masih ada beberapa saran yang dapat diberikan peneliti, diantaranya:

1. Hendaknya perlu diadakan sosialisasi berkelanjutan agar penerapan *good governance* berjalan lebih baik lagi khususnya untuk organisasi non profit.
2. Penelitian selanjutnya supaya memasukkan tambahan informan yang merupakan bagian dari penerapan prinsip *good governance* seperti dari unsur Pemerintah (Dinas Kesehatan), perwakilan dari pihak *Global Fund*, dan pasien TB.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Graha Ilmu. Makassar.

Ahmed, Zahir Uddin. 2004. *Accountability and Control in Non-Governmental Organisation (NGOs) – A case of Bangladesh*. Fourth Asia Pacific Interdisciplinary Research in Accounting Conference. Singapore.

- Antlov, Hans, *et. al*, 2005. *NGO Governance and Accountability in Indonesia : Challenges in a Newly Democratizing Country*. Available at [http://www.icnl.org/research/library/files/Indonesia/Peter\\_NGO%20accountability%20in%20Indonesia%20July%202005%20version.pdf](http://www.icnl.org/research/library/files/Indonesia/Peter_NGO%20accountability%20in%20Indonesia%20July%202005%20version.pdf) (diakses 15 Mei 2017)
- Bastian, Indra. (2007). *Akuntansi Untuk LSM Dan Partai Politik*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bawono, Bernanda Gatot Tri, 2008. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Donaldson. Lex, dan Davis James H. 1991. *Stewardship Theory or Agency Theory : CEO Governance and Shareholders Return*. Australian Journal of Management. Volume 16, p 49-56.
- Fadillah, Sri. Rini Lestari dan Kania Nurcholisah. 2012. *Analisis Pengelolaan Zakat dengan Penerapan Good Governance dilihat dari Faktor-Faktor yang Mempengaruhi sebagai Upaya untuk Meningkatkan Daya Saing Lembaga Amil Zakat*. available at <http://www.igtishadconsulting.com/assets/media/file/file-analisis-pengelolaan-zakat-dengan-penerapan-good-governance-dilihat-dari-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-sebagai-upaya-untuk-meningkatkan-daya-saing-lembaga-amil-zakat.pdf>, (diakses 28 Mei 2017).
- Forum For Corporate governance in Indonesia (FCGI). 2001. *Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance): Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*. Jilid 1, Edisi 3, Jakarta.
- Juiz, Carlos. Carlos Guerrero, dan Isaac Lera. 2014. *Implementing Good Governance Principles for the Public Sector in Information Technology Governance Frameworks*. Open Journal of Accounting. available at <http://www.scirp.org/journal/ojacct> (diakses 25 Mei 2017).
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Mulda, Rahmayandi dan Suranto. 2014. *Kinerja Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Makassar dalam Mewujudkan Good Governance*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik. Vol 1 (3) : 573-603.
- Nkechi.O, Anyadike dan Ikechukwu. EJ, Emeh. 2014. *Effective Leadership for Good Governance in Nigeria; Addressing the Interface*. IOSR Journal of Humanities and Social Science. Vol 19 (1): 69-74.
- Nofianti, Leny dan Novie Susanti Suseno. 2014. *Factor affecting implementation of good government governance (GGG) and their implications towards performance accountability*. International Conference on Accounting Studies. Malaysia.
- Paskual, Meity Ferdiana dan Muhammad Ansar. *Akuntabilitas LSM, Milik Donor atau Publik? (Studi Analisis Wacana Studi Pada Kantor Eksekutif Daerah Walhi Sulawesi Tengah)*. available at <http://asp.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/057-ASPGG-06.pdf>(diakses 15 Mei 2017).
- Rewansyah, Asnawi. 2010. *Reformasi Birokrasi dalam Rangka Good Governance*. Yusaintanas Prima. Jakarta.
- Rubasundram, Geetah A. 2017. *Cultures of Change and Versatile Leaders: Are They Recipe for Good Governance and Sustainability*. OECD Global Anti-Corruption and Integrity Forum. Malaysia.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance “Kepemerintahan yang Baik. Bagian Kedua Edisi Revisi*. CV Mandar Maju. Bandung
- Sugiyono. 2011. *Metode penelitian pendidikan*. Bandung:Alfabeta
- Wirayuni, Kadek Wiwik. Ananta Wikrama Tungga Admadja, dan Ni Luh Gede Erni Sulindawati. 2015. *Pengungkapan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Organisasi Kelompok Nelayan Dharma Samudra Tukadmungga*. Jurnal Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha. Vol 3 (1).
- Yin, Robert K.2011. *Studi Kasus:Desain dan Metode*.Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada